

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi destinasi wisata dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas wilayah terbesar, jumlah penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, Indonesia memiliki laut dan hamparan pantai yang indah tempat wisatawan melakukan aktivitas wisata bahari seperti diving, snorkeling dan surfing. Ditunjang dengan iklim tropis, Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun karena berada pada lintasan garis khatulistiwa sehingga aktivitas kepariwisataan tidak dipengaruhi oleh pergantian musim. Selain itu, Bangsa Indonesia terdiri atas lebih dari 500 suku (etnis), dengan bahasa dan budaya yang beraneka ragam. Keragaman suku dan budaya tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia karena memiliki atraksi wisata budaya dan kuliner yang sangat unik dan beragam.

Melihat kecenderungan global pariwisata dunia serta keadaan alam dan budaya Indonesia, Pemerintah telah mencanangkan bahwa di masa depan yang akan datang Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi Tambang Emas Masa Depan Negara Republik Indonesia. Pembangunan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah pada umumnya diarahkan pada peran kegiatan sosial dan ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pendapatan asli daerah. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pengembangan destinasi pariwisata perlu diimbangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat daerah sekitar wisata.

Hal ini menjadi sangat wajar dikarenakan daerah wisata menjadi pilihan utama wisatawan lokal maupun manca negara. Bahkan pada era globalisasi saat ini, daerah wisata telah berkembang pesat menjadi primadona wisatawan meski hanya untuk sekedar

menghabiskan waktu luang. Upaya pembangunan daerah wisata sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 1978.

Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Upaya yang dilakukan pemerintah saat itu dalam hal pengembangan pariwisata dalam negeri lebih ditunjukkan kepada pengenalan budaya bangsa dan tanah air dengan diimbangi langkah-langkah dan peraturan yang terarah antara lain di bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu dan kelancaran pelayanan. Usaha untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial dan ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Disisi lain, masyarakat sebagai pelaku wisata lebih terfokus dan berorientasi keuntungan, tentu tidak seenaknya melakukan segala sesuatu demi mencapai keuntungan, tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Hal ini, dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari suatu daerah ke daerah lain. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang akan membuat dampak positif dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Liu (dalam Pitana dan Diarta 2009:114) kerangka implementasi kebijakan pariwisata paling tidak menyentuh empat aspek, yaitu: pembangunan dan pengembangan infrastruktur; aktivitas pemasaran; pengembangan kualitas budaya dan lingkungan; pengembangan sumber daya manusia. Secara lebih luas Liu menjabarkan dalam mengembangkan sumber daya manusia disediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggaraan pariwisata termasuk sertifikasi dan program pelatihan, serta teknologi dan *skill*.

Berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih

menuju tempat lain diluar tempat tinggal. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman atau untuk belajar (Gamal, 2004:3). Sedangkan pariwisata dalam Undang- Undang Kepariwisataa Nomor 10 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antara bangsa. Dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara maupun wisatawan lokal akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan daerah tujuan wisatawan.

Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional dengan mengunggah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata misalnya; usaha-usaha transportasi, akomodasi (hotel, motel, pondok wisata, perkemahan, dan lain-lain), yang memerlukan perluasan beberapa industri seperti peralatan hotel dan kerajinan tangan (Wahab, 2003:9)

Dalam kerangka optimalisasi manfaat pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sekitar wisata diadopsi sebagai suatu strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diimplementasikan dalam kerangka *design* dengan pusat dan sasarannya tidak hanya menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah yang bersifat sosial dan budaya.

Dalam konsep pembangunan (berbasis masyarakat) yang dikemukakan oleh

Hasbullah (dalam Pontoh 2010:125) diketahui bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat perlu dilihat beberapa modal komunitas (*community capital*) yang terdiri dari: (a) modal manusia berupa kemampuan personal seperti pendidikan pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan terkait lainnya; (b) Modal Sumberdaya Alam seperti perairan laut; (c) Modal Ekonomi Produktif berupa aspek ekonomi dan finansial serta aset lainnya; dan (d) Modal Sosial berupa norma/nilai, partisipasi dalam jaringan.

Seiring dengan jalannya waktu bahwa pada tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun percepatan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam mencanangkan percepatan tersebut terdapat 3 (tiga) program prioritas untuk meningkatkan potensi pariwisata di Indonesia yang meliputi pemasaran dan promosi keunggulan dan keindahan pariwisata Indonesia, menata komponen pariwisata dari segi (akses, atraksi, dan amenitas), serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM), masyarakat dan industri berdaya saing (<https://ekbis.sindonews.com>, 2016).

Arahan mengenai sektor pariwisata tersebut tertuang dalam surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) No: B-652/Seskab/Maritim/11/2015, dimana salah satunya program pemerintah adalah melakukan promosi dan pemasaran dengan keunggulan dan keindahan alam Indonesia guna menarik kunjungan wisatawan mancanegara (<https://ekbis.sindonews.com>, 2016). Program percepatan ini di upayakan untuk seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia dalam meningkatkan pengembangan pariwisata dengan menonjolkan keunikan dan kekhasan daerah tujuan wisata dalam membangkitkan minat kunjungan wisatawan.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta yang di kenal dan oleh manca negara sebagai daerah kunjungan wisatawan terbanyak di Indonesia oleh sebab itu pemerintah daerah D.I.Y harus terus meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berujung ke D.I.Y. dilihat dari data statistik kunjungan wisatawan pada tahun 2019 dapat dilihat kunjungan wisatawan dari beberapa daerah kabupaten di D.I.Y. di bawah ini adalah

sebagai beriku :

Tabel. 1

Data jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 di D.I.Y

No	Kabupaten	Data destinasi wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
1	Kabupaten Gunung Kidul	50	3, 2 Juta Wisatawan
2	Kabupaten Sleman	38	10,1 Juta Wisatawan
3	Kabupaten Kulon Progo	38	2 Juta Wisatawan
4	Kabupaten Bantul	48	3, 9 Juta Wisatawan

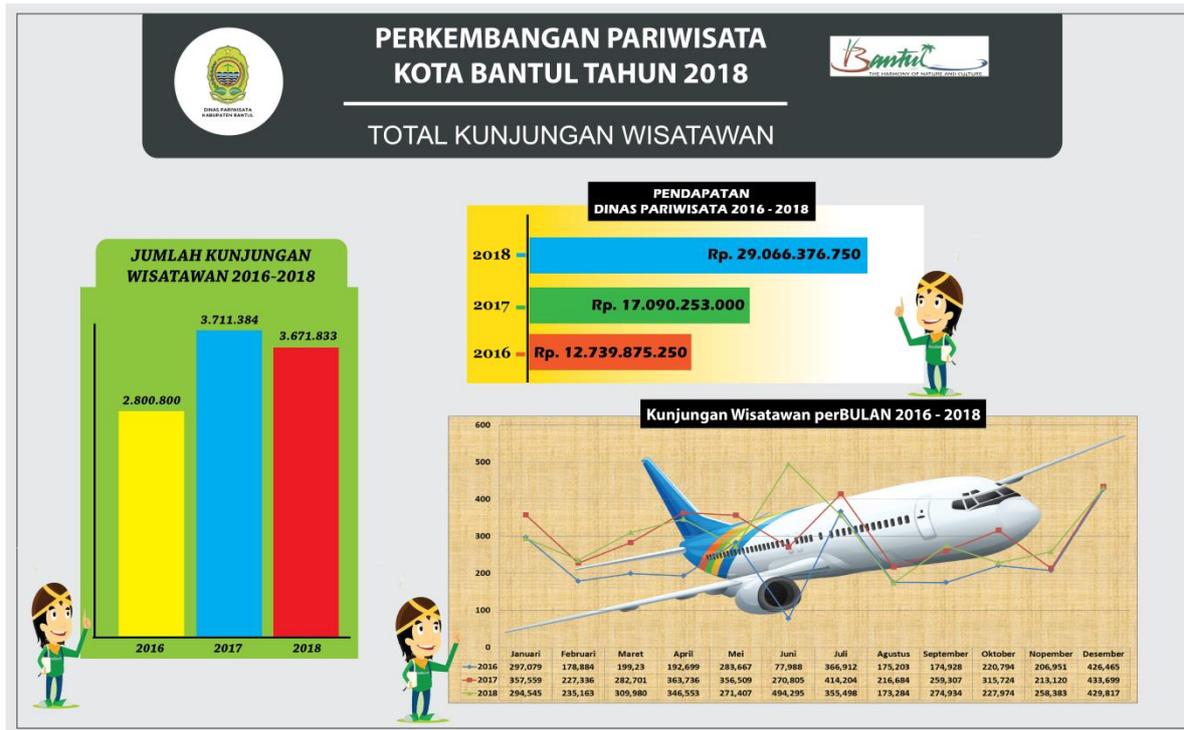
Sumber : Data diolah. 2020

Dilihat dari tabel 1 di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa tingkat kunjungan pariwisata paling dominan di Kabupaten Sleman berkisar 10,1 juta pengunjung, sedangkan di kabupaten bantul menduduki peringkat kedua di banding Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung kidul sebesar 3,9 kunjungan wisatawan, dan di Kabupaten Gunung kidul jumlah wisatawan sebesar 3,2 Juta dan paling rendah berada pada Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah wisatawan 2 jutaan pengunjung.

Jangka pendek, Sub sektor Pariwisata menjadi lokomotif bagi pemulihan ekonomi nasional, sedangkan jangka panjang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia, lebih – lebih aparatur yang menangani bidang kepariwisataan. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai salah satu aparatur yang berwenang.

Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang merupakan tingkat perkembangan pariwisatanya cukup tinggi jika di bandingkan dengan beberapa kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Total perkembangan pariwisata pada Kabupaten Bantul Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1



Sumber : <https://pariwisata.bantulkab.go.id/>

Adanya sektor pariwisata sangatlah mendukung adanya pembukaan lapangan usaha, yang juga menjadi penggerak pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, seperti perdagangan, restoran, souvenir, homestay dan hotel. Pengembangan SDM pada pelaku kepariwisataan di Kabupaten Bantul terutama diarahkan pada penguasaan kompetensi dibidangnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas di bidang kepariwisataan. Tenaga kerja yang berkompeten yang dihasilkan ini akan mampu menarik wisatawan asing sehingga pariwisata di Kabupaten Bantul mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Tidak hanya kepada SDM, namun permasalahan juga terjadi kepada penurunan jumlah pengunjung pariwisata tercatat di pengaruhi oleh beberapa aspek yaitu dari aspek sarana dan prasarana maupun aspek penyedia jasa. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat 237.170 wisatawan datang ke objek wisata di Bumi Projo Tamansari. Akan tetapi ada penurunan kunjungan di Kecamatan Dlingo. Kepala Dinpar Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, selama masa liburan, Dinpar menargetkan 269 ribu wisatawan mengunjungi

tempat wisata Pantai di Bantul. Melihat data kunjungan wisata berertibusi dari bulan juni hingga agustus 2019 tercatat sudah 237.170 wisatawan yang datang ke Bantul.

Jumlah kunjungan terdiri dari 173.200 wisatawan ke kawasan Pantai Parangtritis, 61.086 orang ke kawasan Pantai Samas dan 2.984 orang yang berkunjung ke Goa Selarong dan Goa Cerme. Sedangkan untuk pendapatan dari sektor wisata selama masa liburan ini mencapai miliaran rupiah. Untuk pendapatan dari sektor wisata, terhitung sampai bulan september 2019 sudah mencapai sekitar Rp 2,2 miliar. Namun, di balik jumlah kunjungan yang hampir mencapai target, ada penurunan kunjungan di objek-objek wisata Kecamatan Dlingo. Menurutnya, penurunan kunjungan wisata itu karena banyak bus besar yang tidak bisa melintas di jalur-jalur yang secara standarisasi belum bisa di lewati oleh bus-bus besar. penurunan (kunjungan wisata) cukup banyak terjadi di kawasan Dlingo.

Masalah selanjutnya adalah jalur Patuk-Dlingo merupakan jalur yang disiapkan Pemkab Bantul untuk bus besar yang hendak menuju objek wisata di Kecamatan Dlingo. Namun dalam realisasinya, jalur tersebut tidak bisa dimaksimalkan karena pemasangan road barrier di tengah-tengah jalur. Sehingga, ke depannya Dinpar Bantul akan berkoordinasi dengan Pemkab Gunungkidul. Di mana tujuannya mencari solusi terkait penyelesaian masalah tersebut. sehingga akan menemukan suatu soslusi untuk kembali meningkatkan pengunjung wisatawan pada Kabupaten Bantul (travel.detik.com)

Oleh karena itu, besar harapannya bahwa wisata di kabupaten bantul menjadi objek wisata yang sangat di minati oleh para wisatawan nasional maupun wisatawan asing. Untuk Mendukung Visi yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Serta ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Bantul yaitu : “Pembangunan Kepariwisataaan Daerah adalah “ Bantul Menjadi DestinasiPariwisata Utama Indonesia Yang Bernuansa Harmoni Alam dan BudayaUntuk Kesejahteraan Masyarakat”. Serta dalam mendukung visi tersebut harus

melalui proses yang dituangkan dalam Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang bernuansa lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, bertanggung jawab, dan berskala luas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan mengikuti perkembangan teknologi;
- c. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan mewujudkan masyarakat sadar wisata.

Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai tiga program dan lima belas kegiatan. Adapun ketiga program tersebut adalah: (1) Program pengembangan pemasaran pariwisata (2) Program pengembangan destinasi pariwisata (3) Program pengembangan kemitraan. Ketiga program tersebut telah terealisasi, namun apabila dilihat dari hasil evaluasi berdasarkan capaian kinerja atas kunjungan wisata masih kurang dari target. Sehingga kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata di wilayah Kabupaten Bantul belum optimal.

Hal ini dikarenakan para pekerja wisata belum optimal dalam mendukung pariwisata yang berada di kawasan destinasi pariwisata Kabupaten Bantul. Selain itu, para pekerja wisata belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang potensi wisata yang berada di wilayahnya dalam menopang penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja

(employment).

Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Pariwisata sebagai sebuah industri yang sangat bergantung pada keberadaan manusia. Terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari manusia yang melakukan wisata yang berperan sebagai konsumen yaitu pihak-pihak yang melakukan perjalanan wisata/wisatawan dan manusia sebagai produsen yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Sehingga aspek manusia salah satunya berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara (Setiawan, 2016: 24).

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (people) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (service-based organization), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja (Evans, Campbell, & Stonehouse, 2003). Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja. Seperti pada industri pariwisata, dimana perusahaan memiliki hubungan langsung yang bersifat intangible (tak berwujud) dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta nyaman kepada para konsumennya (Setiawan, 2016: 23-24).

Produk industri pariwisata adalah jasa, oleh karena itu penekanannya harus pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam industri pariwisata,

kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat profesionalnya (Nandi, 2008: 5). Pengembangan SDM di industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan negara, wilayah dan benua.

Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki suatu Negara termasuk Kabupaten Bantul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat. Oleh karena itu diperlukan berbagai keahlian, baik keahlian manajerial maupun keahlian/keterampilan teknis, serta kemampuan dan kemauan kepemimpinan yang berorientasi mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara. Untuk dapat mengatasi dan menghindari implikasi tersebut. Maka, untuk itu Dispar Kabupaten Bantul juga mengambil peranan penting sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pariwisata dan di dalam peningkatan kualitas SDM Dinas pariwisata Kabupaten Bantul harus lebih fokus kepada peningkatan SDM dalam hal ini adalah pelaku-pelaku pada bidang kepariwisataan di Kabupaten Bantul. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana : “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul“.

I.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul??

I.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul.

Kegunaan penelitian adalah manfaat dari penelitian secara praktis oleh pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Untuk menambah pengetahuan di bidang pariwisata yaitu dengan mengetahui instansi pemerintah yang menangani pada bidang tersebut, tentunya dapat memberi gambaran kepada kita terhadap instansi tersebut khususnya upaya Dispar Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kualitas SDM pada bidang kepariwisataan di Bantul.

2. Secara Praktis :

Untuk mengadakan perbandingan antara teori yang didapat dari akademik dengan praktek yang sebenarnya di lapangan (kantor – kantor/badan – badan atau juga instansi pemerintah), dan menjadi acuan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian pada hal yang sama. Serta mengetahui sejauh mana Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Kepariwisata Di Kabupaten Bantul.

3. Secara Akademis :

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian Program study Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.